

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERPIDANA MENDUDUKI TANAH TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)

Oleh:

Immanuel CML Tobing

Sumber daya agrarian atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang meliputi aspek ekonomi bahkan aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana denda terhadap terpidana menduduki tanah tanpa izin dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 pada penerapan saat ini.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960 tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi korban selaku pemilik sah hak atas tanah dan relevansinyatidak berlaku dengan kondisi saat ini, baik dalam segi substansi hukum, aturan hukum, sanksi, penerapan dan pelaksanaannya.

Aparat penegak hukum sebagai pelaksana dari sistem peradilan, mulai dari Penyidik sebagai penyidik dan sekaligus Penuntut Umum Terdakwa serta Hakim yang memeriksa dan memutus perkara hendaknya diberikan pembekalan terhadap penanganana perkara sebagaimana tertuang dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta dapat hendaknya mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi pidana denda, Tanah

ABSTRACT

Effectiveness of Penal Sanctions Occupying Land Without Permission (Study of Decision Number: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)

By:

Immanuel CML Tobing

Agrarian resources or natural resources in the form of the earth's surface called land, in addition to providing many benefits but also giving birth to cross-sectoral problems covering economic aspects and even legal aspects. This research aims to analyze how the effectiveness of the application of criminal sanctions of fines against convicts occupying land without permission and what are the obstacles in the implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Prp) No. 51 of 1960 in the current application.

The research method used in this research uses normative juridical approach and empirical juridical approach.

The results of the study concluded that the criminal fine imposed by the judge against the defendant of the offense of using land without the permission of the rightful landowner as stipulated in Article 6 paragraph 1 letter a of Perpu (Government Regulation in Lieu of Law) No.51/PRP/1960 is not effective and does not have a deterrent effect on the perpetrator and results in the non-achievement of legal certainty for the victim as the legal owner of land rights and relevance is not applicable to current conditions, both in terms of legal substance, legal rules, sanctions, application and implementation.

Law enforcement officials as executors of the justice system, starting from the Investigator as an investigator and at the same time the Defendant's Public Prosecutor and Judges who examine and decide cases, should be given a briefing on case handling as stated in Perpu (Government Regulation in Lieu of Law) Number 51 of 1960 and can optimize their capacity and ability to carry out their respective duties.

Keywords: *Effectiveness, Fines, Land*